

Optimalisasi Peran Humas Polres Bogor dalam Meningkatkan Citra Kepolisian Berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2023

Sutan Martua Lubis¹, M Rendi Aridhayandi², Yuniar Anisa Ilyanawati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Email: sutan.maritua@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Email: m.rendi.aridayandi@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Email: yuniar.anisa@unida.ac.id

ABSTRAK

Optimalisasi peran Humas Polres Bogor dalam meningkatkan citra Kepolisian menjadi aspek strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Humas Polres Bogor dalam mengimplementasikan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Manajemen Kehumasan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta mengevaluasi strategi yang digunakan dalam membentuk dan mempertahankan citra positif Polri di tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Polres Bogor telah mengoptimalkan berbagai media komunikasi, baik konvensional maupun digital, untuk menyampaikan informasi, klarifikasi isu, dan membangun interaksi yang positif dengan masyarakat. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan dinamika media sosial yang cepat berubah. Upaya peningkatan kapasitas SDM dan sinergi dengan stakeholder menjadi faktor penting dalam penguatan fungsi kehumasan. Kesimpulannya, optimalisasi peran Humas Polres Bogor secara efektif berkontribusi dalam peningkatan citra Polri yang humanis, transparan, dan profesional.

Kata Kunci: Humas, Polres Bogor, Citra Polisi

PENDAHULUAN

Dalam era keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi digital yang pesat, institusi kepolisian tidak lagi cukup hanya menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban secara represif (Claire Austin, 2019). Saat ini, keberhasilan suatu institusi publik—termasuk Polri—sangat bergantung pada bagaimana citra dan reputasi institusi tersebut terbentuk di mata masyarakat (Dadang Suprijatna, 2015). Citra merupakan persepsi publik yang dibentuk dari berbagai interaksi, informasi, dan pengalaman yang dialami oleh masyarakat terhadap institusi tersebut (Rendi, 2018). Dalam konteks inilah peran Humas (Hubungan Masyarakat) menjadi sentral dan strategis, terutama di lingkungan Polres yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Humas Polres Bogor memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menjaga hubungan baik antara kepolisian dengan masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika sosial yang kian kompleks. Fungsi ini menjadi semakin penting sejak diberlakukannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Manajemen Kehumasan di Lingkungan Polri. Regulasi ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam penyampaian informasi dan pengelolaan opini publik.

Polres Bogor sebagai bagian dari institusi Polri yang berada di wilayah penyangga Ibu Kota Negara memegang peranan krusial dalam membangun kepercayaan publik. Wilayah ini tidak hanya mengalami urbanisasi yang cepat tetapi juga menjadi titik temu beragam kepentingan sosial dan politik. Oleh karena itu, manajemen informasi publik harus dilakukan secara tepat, sistematis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam praktiknya, Humas Polres Bogor berperan sebagai corong utama dalam menyampaikan program, prestasi, serta klarifikasi terhadap isu-isu yang dapat merugikan citra institusi kepolisian.

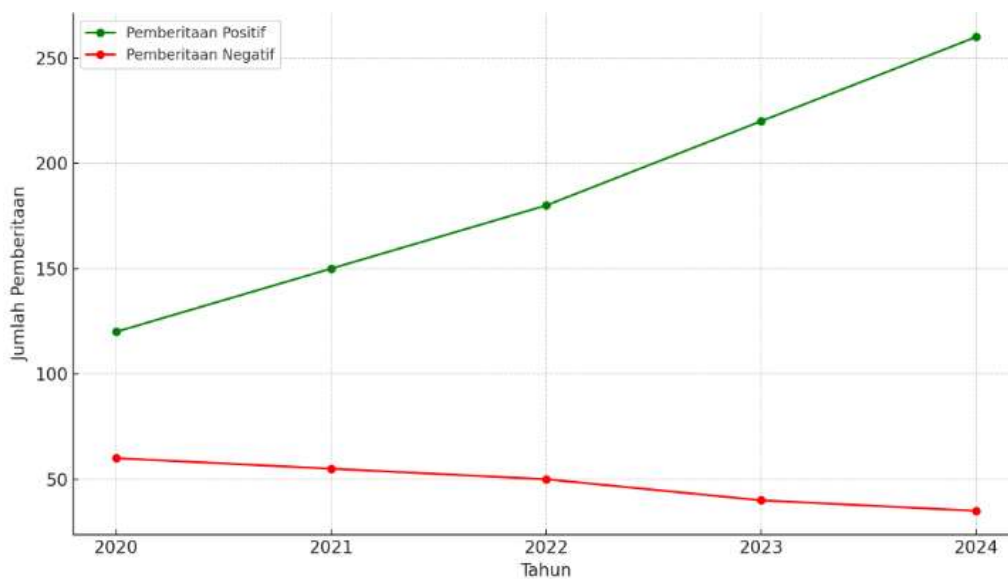
Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya media sosial, menjadi peluang sekaligus tantangan (Friendman, 2020). Di satu sisi, media sosial memberikan ruang

untuk penyebaran informasi secara cepat dan luas; namun di sisi lain, juga membuka potensi tersebarnya informasi yang belum terverifikasi (*hoaks*), yang dapat mencoreng nama baik institusi. Oleh sebab itu, Humas dituntut untuk mampu mengelola komunikasi publik secara aktif, responsif, dan strategis.

Berdasarkan data monitoring pemberitaan mengenai Polres Bogor dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren positif dalam pemberitaan di media massa. Grafik di bawah ini menunjukkan peningkatan jumlah pemberitaan positif yang signifikan, seiring dengan semakin aktifnya peran Humas dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.

Grafik 1.

Tren Pemberitaan tentang Polres Bogor (2020-2024)



Sumber: Humas Polres Bogor, data diolah, 2025.

Dari grafik di atas, dapat diamati bahwa jumlah pemberitaan positif tentang Polres Bogor meningkat dari 120 berita pada tahun 2020 menjadi 260 berita pada tahun 2024. Sebaliknya, pemberitaan negatif mengalami penurunan dari 60 berita menjadi 35 berita pada kurun waktu yang sama. Hal ini menandakan bahwa terdapat upaya yang konsisten dan progresif dalam membentuk citra institusi yang lebih baik melalui strategi komunikasi yang tepat.

Namun demikian, optimalisasi peran Humas bukan tanpa tantangan. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kehumasan, sarana teknologi komunikasi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal, serta masih adanya paradigma lama yang memandang kehumasan hanya sebatas pelengkap dalam struktur organisasi.

Penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Humas Polres Bogor mengimplementasikan Perkap Nomor 6 Tahun 2023, serta bagaimana strategi yang diterapkan mampu membentuk citra positif institusi kepolisian di tengah masyarakat yang semakin kritis dan melek informasi. Dengan analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi strategis dalam rangka penguatan fungsi kehumasan Polri di tingkat daerah, khususnya Polres Bogor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, (Martin Roestamy, 2020) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Humas Polres Bogor dalam meningkatkan citra institusi kepolisian berdasarkan kerangka normatif yang ditetapkan dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2023 tentang Manajemen Kehumasan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada sifat permasalahan yang menekankan pada proses, makna, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui angka atau statistik semata (Rendi, 2024).

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) Bogor. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena Polres Bogor dinilai representatif dalam implementasi kebijakan kehumasan kepolisian di wilayah urban dan semi-urban. Informan utama dalam penelitian ini meliputi Kepala Seksi Humas, staf kehumasan, serta beberapa anggota Polres yang berkaitan dengan fungsi komunikasi publik. Informan pendukung berasal dari pihak eksternal, seperti wartawan lokal,

tokoh masyarakat, dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap isu citra kepolisian.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman (Tanti, 2020), yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Endeh Suhartini, 2018). Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi informasi yang relevan, sementara penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan visualisasi yang sistematis (Yudi, 2021) Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkesinambungan selama proses pengumpulan data berlangsung (Nurwati, 2017).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik (Luthfi, 2025) Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan dan dari beragam narasumber, guna memperoleh gambaran yang objektif dan utuh (Yuniar, 2024).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya aspek formal dari kebijakan kehumasan Polri, tetapi juga dimensi praksis yang terjadi di lapangan, termasuk hambatan dan peluang dalam membangun citra positif kepolisian di era keterbukaan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Humas Polres Bogor dalam Meningkatkan Citra Polri

Humas (Hubungan Masyarakat) merupakan garda depan dalam membentuk persepsi publik terhadap institusi kepolisian. Dalam konteks Polres Bogor, peran Humas tidak hanya terbatas pada kegiatan diseminasi informasi, tetapi lebih luas mencakup upaya sistematis membangun kepercayaan, menciptakan kedekatan emosional, serta merespons dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Perkap Nomor 6 Tahun 2023 secara eksplisit menegaskan bahwa kehumasan Polri harus dilaksanakan secara profesional,

terstruktur, dan strategis demi menunjang tugas pokok kepolisian dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Humas Polres Bogor menjalankan peran komunikatif melalui berbagai saluran komunikasi, baik konvensional maupun digital. Pada aspek komunikasi media, Humas aktif membangun kemitraan dengan media lokal dan nasional guna memastikan keberimbangan pemberitaan. Publikasi kegiatan positif seperti pengungkapan kasus, program kemanusiaan, dan pelayanan publik rutin didistribusikan secara intensif (Dadang, 2024). Strategi ini bertujuan menciptakan narasi tandingan terhadap potensi pemberitaan negatif yang kerap muncul akibat peristiwa tunggal yang viral.

Dalam ranah media sosial, Humas Polres Bogor menunjukkan adaptabilitas tinggi terhadap transformasi digital. Platform seperti Instagram, Twitter (X), Facebook, dan YouTube digunakan sebagai kanal penyampaian informasi yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh publik. Konten yang disajikan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga edukatif dan humanis, seperti video pelayanan SIM keliling, edukasi etika berlalu lintas, hingga liputan kegiatan sosial polisi bersama masyarakat. Pendekatan visual yang menarik dan bahasa komunikasi yang bersahabat menjadi kunci dalam menjangkau kelompok masyarakat muda yang mendominasi pengguna media sosial.

Peran lainnya yang tak kalah penting adalah membangun komunikasi dua arah (dialogis). Humas secara aktif membuka ruang interaksi melalui sesi tanya jawab daring, polling opini publik, serta penanganan keluhan melalui pesan langsung. Hal ini mencerminkan bahwa citra Polri tidak dibangun secara sepihak, melainkan melalui proses partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai mitra kritis.

Menariknya, Humas Polres Bogor juga melibatkan personel dengan latar belakang kemampuan komunikasi dan jurnalistik dalam menyusun narasi

pemberitaan dan siaran pers. Profesionalisme ini menjadi fondasi dalam menjaga konsistensi pesan kelembagaan. Di sisi lain, pelatihan berkala dan pendampingan terhadap personel humas dilakukan agar mereka tetap relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan dinamika komunikasi massa.

Bukti keberhasilan peran Humas dapat dilihat dari peningkatan jumlah pemberitaan positif dan penurunan pemberitaan negatif mengenai Polres Bogor selama kurun waktu lima tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa kerja Humas tidak hanya berdampak pada citra eksternal, tetapi juga pada kebanggaan dan motivasi internal anggota Polri sendiri.

Dengan demikian, peran Humas Polres Bogor telah berkembang dari sekadar fungsi komunikasi menuju elemen strategis dalam membentuk legitimasi sosial institusi kepolisian. Keberhasilan mereka dalam meningkatkan citra Polri tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis komunikasi, tetapi juga pada pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai kelembagaan dan sensitivitas terhadap dinamika sosial masyarakat.

B. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan dalam Meningkatkan Peran Humas Polres Bogor dalam Meningkatkan Citra Polri

Peningkatan peran Humas Polres Bogor dalam membangun citra positif Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan proses yang tidak sederhana dan tidak bebas dari berbagai kendala. Dalam realitasnya, dinamika masyarakat yang cepat berubah, perkembangan teknologi informasi, serta ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja kepolisian (Faisal, 2024) menjadi tantangan tersendiri bagi unit kehumasan Polres Bogor. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara kritis hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya strategis yang telah dan sedang dilakukan dalam rangka optimalisasi peran tersebut.

1. Hambatan Internal

Hambatan pertama yang dihadapi Humas Polres Bogor bersumber dari aspek internal kelembagaan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi spesifik di bidang kehumasan. Tidak semua personel yang ditempatkan di bagian Humas memiliki latar belakang pendidikan komunikasi, jurnalistik, atau public relations. Akibatnya, dalam praktiknya sering ditemukan ketimpangan antara kebutuhan teknis di lapangan dengan kemampuan teknis yang dimiliki personel. Hal ini berdampak pada kualitas produksi konten, kecepatan respon terhadap isu publik, serta strategi penyampaian pesan yang kurang optimal.

Di samping itu, beban kerja yang tinggi akibat struktur organisasi yang relatif ramping membuat personel Humas harus merangkap beberapa peran sekaligus. Misalnya, dalam satu waktu seorang staf Humas dapat merangkap sebagai editor video, penulis berita, pengelola media sosial, hingga narahubung dengan wartawan. Situasi ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara kuantitas tugas dengan kualitas keluaran yang dihasilkan (Jenny, 2024)..

Aspek lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan anggaran operasional kehumasan. Banyak kegiatan strategis seperti kampanye citra, publikasi melalui media berbayar, pelatihan komunikasi, hingga pengadaan perangkat teknologi informasi harus ditunda atau dibatasi karena minimnya alokasi dana. Padahal, di era persaingan narasi dan kecepatan informasi seperti saat ini, investasi di sektor kehumasan menjadi faktor krusial dalam mempertahankan dan meningkatkan citra institusi.

2. Hambatan Eksternal

Selain tantangan internal, Humas Polres Bogor juga menghadapi hambatan eksternal yang kompleks. Salah satu bentuk nyata adalah derasnya arus informasi di media sosial yang sering kali didominasi oleh narasi negatif, hoaks, atau framing yang merugikan institusi kepolisian. Fenomena ini diperparah dengan budaya digital masyarakat yang lebih cepat mempercayai informasi viral ketimbang klarifikasi resmi dari instansi pemerintah.

Kritik publik yang tajam terhadap kinerja aparat di beberapa wilayah, meskipun bukan merupakan representasi dari Polres Bogor, tetap berdampak pada persepsi kolektif masyarakat terhadap Polri secara keseluruhan. Hal ini menjadi beban citra yang harus ditanggung bersama oleh seluruh jajaran, termasuk Polres Bogor, yang sebetulnya telah berupaya membangun relasi yang baik dengan masyarakat.

Ketergantungan terhadap media massa juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua media bersikap netral dalam pemberitaan. Terkadang, kepentingan bisnis dan sensasi pemberitaan lebih dikedepankan dibanding objektivitas, sehingga kerja keras Humas dalam menyampaikan fakta bisa tertutupi oleh headline yang provokatif. Polres Bogor juga kerap menghadapi keterbatasan akses untuk mempublikasikan konten secara merata di media nasional, mengingat alokasi ruang berita sering kali dipengaruhi oleh kedekatan relasi dan kekuatan ekonomi.

3. Upaya Strategis yang Dilakukan

Menyadari berbagai hambatan di atas, Humas Polres Bogor telah melakukan sejumlah langkah strategis guna mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam membentuk citra positif kepolisian. Upaya pertama adalah penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan internal dan kerja sama lintas

institusi. Beberapa personel Humas secara berkala mengikuti workshop tentang manajemen krisis komunikasi, teknik jurnalistik digital, dan pengelolaan media sosial. Bahkan, dalam beberapa kasus, Polres Bogor mengundang praktisi komunikasi eksternal sebagai narasumber untuk meningkatkan kompetensi personel.

Selain itu, penguatan jejaring kemitraan dengan media massa terus ditingkatkan. Humas membangun relasi strategis dengan wartawan lokal melalui forum-forum diskusi santai dan pelatihan bersama guna mendorong pemberitaan yang lebih berimbang dan berbasis fakta. Relasi informal ini terbukti efektif dalam mengelola isu-isu sensitif secara preventif sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi yang lebih besar.

Dari sisi digitalisasi, Humas Polres Bogor memaksimalkan platform media sosial dengan pendekatan kreatif dan responsif. Tim khusus dibentuk untuk mengelola konten harian, menjawab pertanyaan warganet, serta memonitor trending topic yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif. Inovasi konten seperti infografis interaktif, video pendek edukatif, dan liputan human interest menjadi andalan dalam mendekatkan institusi dengan masyarakat luas, khususnya generasi muda.

Dalam upaya mengatasi keterbatasan anggaran, Polres Bogor mengintegrasikan kegiatan kehumasan dengan program kerja dari satuan fungsi lain seperti Satlantas dan Binmas, sehingga sinergi anggaran dan kegiatan dapat dicapai tanpa tumpang tindih. Beberapa kegiatan juga dilaksanakan dengan dukungan sponsor dari mitra eksternal, dengan tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Secara normatif, seluruh kegiatan kehumasan dijalankan dalam kerangka Perkap Nomor 6 Tahun 2023 yang memberikan dasar hukum dan

arah strategis bagi kegiatan komunikasi kelembagaan Polri. Hal ini memberikan kepastian hukum dalam penyusunan SOP, struktur organisasi, dan indikator keberhasilan unit kehumasan.

4. Dampak dari Upaya yang Dilakukan

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Humas Polres Bogor secara bertahap mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data pemantauan media lokal dan media sosial dalam dua tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pemberitaan positif tentang Polres Bogor, sekaligus penurunan kasus viral yang bersifat negatif. Kepercayaan publik juga meningkat, yang terlihat dari partisipasi aktif masyarakat dalam program-program kepolisian serta peningkatan followers dan engagement di akun media sosial resmi.

Selain itu, internal Polres Bogor juga mengalami peningkatan solidaritas kelembagaan, di mana tiap satuan fungsi menyadari pentingnya peran Humas dalam mendukung keberhasilan tugas pokok mereka. Citra polisi yang lebih humanis dan profesional secara bertahap menggantikan stereotip lama yang kerap dilekatkan secara generalisasi kepada institusi.

KESIMPULAN

Peran Humas Polres Bogor sangat strategis dalam membentuk, membina, dan memelihara citra positif institusi Polri di tengah masyarakat. Peran ini dijalankan melalui fungsi komunikasi dua arah, publikasi kegiatan kepolisian, edukasi publik, serta pengelolaan media sosial secara aktif. Kehadiran Humas sebagai jembatan komunikasi antara Polres dan masyarakat menjadi elemen kunci dalam membangun kepercayaan dan legitimasi sosial institusi kepolisian.

Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik dari segi internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran operasional, dan kapasitas teknis, maupun dari segi eksternal seperti

tantangan era digital, derasnya arus informasi negatif, serta persepsi publik yang cenderung dibentuk oleh media. Kendala-kendala ini secara nyata mempengaruhi efektivitas komunikasi kelembagaan yang dijalankan Humas Polres Bogor.

Polres Bogor telah menempuh berbagai langkah strategis untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain dengan meningkatkan kapasitas personel melalui pelatihan, menjalin kemitraan dengan media lokal, mengembangkan strategi komunikasi digital yang responsif dan edukatif, serta melakukan sinergi program dengan satuan fungsi lain. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tetap mengacu pada Perkap Nomor 6 Tahun 2023 sebagai landasan normatif dan operasional.

Secara umum, terdapat progres positif yang ditunjukkan oleh Humas Polres Bogor dalam meningkatkan citra Polri, yang ditandai oleh meningkatnya engagement masyarakat di media sosial resmi Polres, bertambahnya frekuensi pemberitaan positif di media lokal, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program-program kepolisian. Citra Polri sebagai institusi yang humanis dan profesional perlahan mulai terbangun, menunjukkan bahwa strategi kehumasan yang terukur dan adaptif sangat berpengaruh terhadap persepsi publik.

REFERENSI

- Aridhayandi, M. Rendi.** (2024). *Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan Air Minum untuk Konsumen Melalui Perusahaan Daerah Air Minum*. Jurnal Karimah Vol. 3 No. 3.
- Aridhayandi, M. Rendi.** (2018). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*. Jurnal Hukum & Pembangunan. No. 4.
- Austin, Claire.** (2019). *Public Relations yang Sukses Dalam Sepekan*. Pelita Group, Semarang.
- Faisal, Muhammad, Ani Yumarni, Mulyadi.** (2024). *Analisis Hukum Penanggulangan Kerumunan Massa yang Berpotensi Mengganggu Kamtibmas di Wilayah Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021*. Karimah Tauhid: Vol. 3 No. 6.
- Friendman.** (2020). *Teori dan Filsafat Hukum, Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*. PT Raja Grafindo, Jakarta.

- Hidayani, Jenny, Sudiman Sihotang, R. Yuniar Anisa Ilyanawati.** (2024). *Perlindungan Hukum atas Jual Beli Tanah yang Tidak Dicatatkan*. Karimah Tauhid: Vol. 3 No. 4.
- Lutfhi Martin, Muhammad, Jacobus Jopie Gilalo, R. Yuniar Anisa Ilyanawati.** (2025). *Analisis Hukum Pemberian Sanksi terhadap Mucikari dalam Perkara Prostitusi Online dengan Pekerja Seks Komersial Anak*. Jurnal Karimah Vol. 4 No. 4.
- Nurwati.** (2017). *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kabupaten Bogor)*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Volume 3 No. 2, September.
- Dadang Suprijatna, Muhammad Aminullah.** (2024). *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 3.
- Dadang Suprijatna.** (2015). *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*. Bogor, Universitas Djuanda.
- Dadang Suprijatna.** (2016). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Volume 2 No. 1, Maret.
- Roestamy, Martin, Endeh Suhartini, Ani Yumarni.** (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda*. Bogor.
- Roestamy, Martin.** (2016). *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Volume 2 No. 1, Maret.
- Suhartini, Endeh, Ani Yumarni, Omon Remen.** (2018). *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of PT Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Volume 4 No. 1, Maret.
- Utami, Tanti Kirana, M. Rendi Aridhayandi.** (2020). *Regulasi Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana dalam Rangka Meningkatkan Softskill dan Literasi Keuangan*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 6 No. 1.
- Yuniar Anisa, R., Ika Darmika, Rohanisa.** (2024). *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kajian Khusus: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)*. Jurnal Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 1.
- Yudi Junadi, Dedi Mulyadi, M. Rendi Aridhayandi, Christopher Surya Salim.** (2021). *Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Konfigurasi Politik Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 7 No 2.